

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN 2023



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima – Serang Telp. (0254) 267142 Fax. (0254) 267143

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten akhirnya selesai kami susun.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2023 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2023.

Akhirnya kami berharap semoga Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2023 dapat digunakan sebagai dokumen perencanaan untuk turut mensukseskan program-program pembangunan dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Pemerintah Provinsi Banten yang Kami cintai.

Serang, Januari 2024

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN



H. DEDEN APRIANDHI H, S.STP, M.Si
NIP. 19750428 199412 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Ruang Lingkup	2
BAB II GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA LAYANAN.....	4
2.1 Tugas Pokok dan Struktur Organisasi.....	4
2.2 Sumberdaya	12
2.3 Sarana dan Prasarana.....	13
2.4 Anggaran.....	20
BAB III MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI 2023.....	30
3.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	30
3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	30
3.3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	32
3.4 Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2023	35
BAB IV PENUTUP.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek (tahunan) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/Kota. Selain itu hendaknya juga dilakukan secara bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing serta memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu disusun Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi sebagai salah satu dokumen perencanaan awal dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran SKPD yang dalam pelaksanaannya dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan visi, misi dan tugas pokok dan fungsinya adalah dengan berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP;
11. Keputusan Kepala Badan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4);
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor : 14).

1.3. Maksud dan Tujuan

Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten disusun dengan maksud sebagai salah satu sarana evaluasi dalam rangka mencapai visi dan misi serta pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan tujuannya adalah sebagai pedoman atau acuan untuk melangkah melaksanakan program-program pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat khususnya penegakkan stabilitas daerah untuk menunjang stabilitas dan keamanan pembangunan bagi kewenangan instansi dan perangkat daerah yang lainnya di Provinsi Banten.

1.4. Ruang Lingkup

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi : Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik, Pembinaan, fasilitasi

dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa, politik dalam negeri di lingkup provinsi dan kabupaten/kota.

1) Visi dan Misi

Visi : “Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah“.

Misi :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
2. Membangun dan Meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Dokumen Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi 2023 berperan penting untuk melihat sejauh apa pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mewujudkan perencanaan yang prospektif, realistis dan akuntabel dalam rangka menuju Provinsi Banten yang maju mandiri dan transparan bagi masyarakat Banten dan Sejahtera.

BAB II

GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA LAYANAN

2.1. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten adalah salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten masuk ke dalam klasifikasi Urusan Pemerintahan Umum sehingga berimplikasi pada bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam masa transisi/peralihan tidak merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 83 tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, namun tetap merujuk pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 tahun 2013, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mempunyai tugas pokok.

“Membantu Gubernur dalam melaksanakan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik meliputi bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan ekonomi serta fasilitasi pembinaan politik”.

dan mempunyai fungsi :

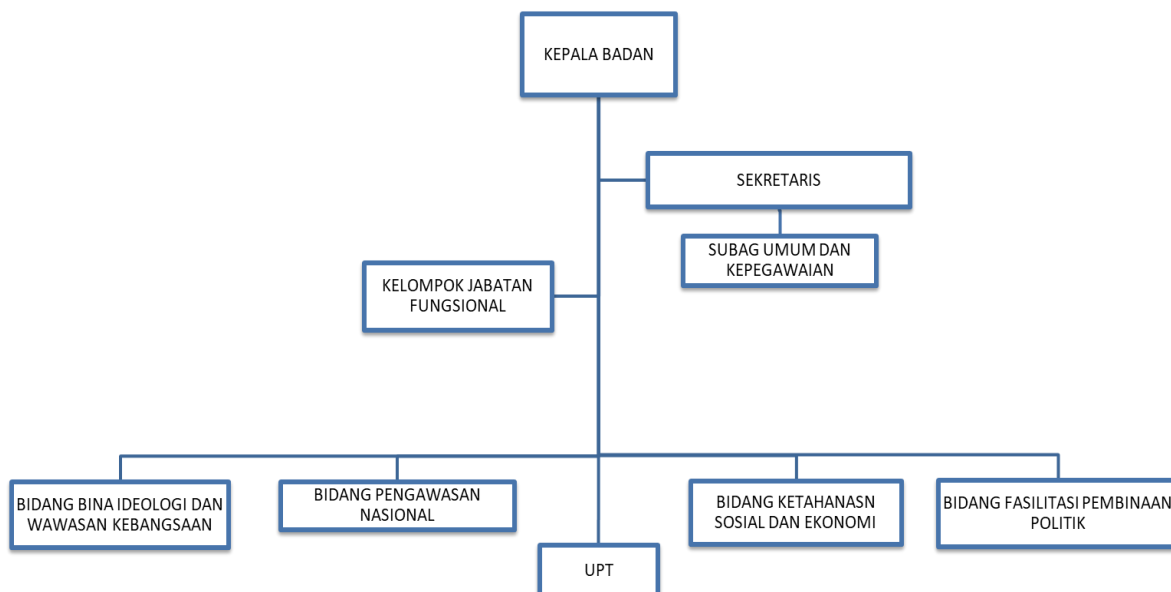
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kewaspadaan Nasional;
- d. Perumusan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
- e. Perumusan kebijakan teknis dibidang Fasilitasi Pembinaan Politik;
- f. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Provinsi;
- g. Pelaksanaan laporan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mempunyai struktur organisasi seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

Sumber : Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 tahun 2013, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten



Uraian tugas pokok dan fungsi setiap unsur dalam struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Di dalam pasal 616 Pergub No. 14 Tahun 2013, dinyatakan bahwa Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu gubernur dalam melaksanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi bina ideologi, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan ekonomi serta fasilitasi pembinaan politik, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional;
- d. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
- e. Perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Pembinaan Politik;
- f. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Provinsi;
- g. Pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan, menyusun dan menetapkan program kerja Badan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, sosial ekonomi serta pembinaan politik;
- b. Merumuskan, menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan rencana strategis (RENSTRA) Badan dan menetapkan standar norma, pedoman dan prosedur

kerja;

- c. Merumuskan dan menetapkan standar pelayanan minimal (SPM) secara tepat pada penetapan kinerja (TAPKIN);
- d. Mengkoordinasikan pengendalian kegiatan sebagai mediasi, komunikasi dan fasilitas dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara supra dan infrastruktur politik dalam rangka terwujudnya kehidupan politik yang demokratis;
- e. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan mediasi, komunikasi dan fasilitas dalam mendorong terwujudnya ketahanan bangsa melalui peningkatan wawasan dan pembauran di persatuan bangsa;
- f. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan mediasi, komunikasi dan fasilitas kewaspadaan dan kegiatan masyarakat dalam menghadapi timbulnya berbagai gejolak dan bencana sosial dan kerusuhan dalam rangka memelihara kondisi politik yang kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa;
- g. Mengawasi, mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta terjaminnya sistem politik yang demokratis melalui kewaspadaan nasional;
- h. Melakukan pembinaan dan motivasi bawahan dengan memberikan bimbingan dan pelatihan lainnya untuk meningkatkan produktivitas dan karier aparatur yang berbasis kinerja;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah ideologi dan wasbang, konflik sosial, politik dan ketahanan sosial ekonomi;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program;
- k. Mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan urusan umum;
- l. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
- m. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sesuai dengan Pasal 617 bahwa tugas sekretaris adalah membantu Kepala Badan dalam melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan serta

evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya **Sekretaris**, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- c. Perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan supervisi dan pelaporan meliputi LAKIP, LKPJ, LPPD dan kebijakan standarisasi program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- e. Penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- f. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan;
- g. Pengelolaan dan penyelenggaraan data dan informasi.

Dalam melaksanakan fungsinya **Sekretaris**, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja kesekretariatan Badan;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- d. Menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- e. Meyiapkan bahan program dan pelaporan meliputi LAKIP, LKPJ, LPPD dan kebijakan standarisasi program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- f. Menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, perpustakaan, kehumasan dan penyusunan program;
- g. Menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;
- h. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian Badan;
- i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- j. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten membawahkan,

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan Pasal 618 ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan. Adapun untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian;
- b. Melaksanakan administrasi ketatausahaan Badan;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
- d. Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
- e. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan;
- f. Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan;
- g. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor serta lingkungannya;
- h. Melaksanakan fungsi kehumasan;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian lingkup Badan;
- j. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Berdasarkan Pasal 621 Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan kebijakan bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pelaksanaan pembauran dan kewarganegaraan;
- c. Penyusunan evaluasi serta pelaksanaan monitoring dibidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja bidang;

- b. Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa, Pemantapan Ideologi dan Bela Negara;
 - c. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pengembangan, sosialisasi dan pelatihan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, kewaspadaan nasional, pemantapan ideologi dan pelaksanaan bela negara.
 - d. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan pembinaan kewarganegaraan;
 - e. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan kerukunan antar etnis dan umat beragama;
 - f. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan kewaspadaan nasional;
 - g. Menyiapkan bahan program kerja/ kegiatan di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - h. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - i. Menyiapkan bahan pengelolaan tertib administrasi Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - j. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
 - k. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional

Berdasarkan Pasal 624 Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kewaspadaan Nasional. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi dan inventarisasi dan pemantauan orang asing;
- b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan sosial, pencegahan dan penanganan konflik untuk peningkatan kewaspadaan nasional;
- c. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi kajian masalah politik, strategis daerah;
- d. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi masalah sosial budaya dan ekonomi;

- e. Penyusunan evaluasi dan pelaporan serta monitoring di bidang Kewaspadaan Nasional.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Bidang;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan penanganan konflik;
- c. Menyiapkan bahan perumusan dukungan teknis dalam penanganan dan antisipasi dini potensi konflik dan masalah-masalah strategis di daerah;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kegiatan pengkajian, analisa data dan informasi mengenai potensi kerawanan konflik baik konflik politik, ekonomi, sosial budaya, suku, agama, ras, konflik vertikal, horisontal maupun diagonal;
- e. Menyiapkan bahan perumusan kerjasama Intelkam berdasarkan hasil kajian dengan unit kerja terkait dalam rangka meningkatkan pengamanan daerah;
- f. Menyiapkan bahan rumusan kegiatan pengkajian, analisa data dan informasi tentang masalah dan isu-isu strategis, penyimpangan perilaku sosial, serta memantau keberadaan orang asing dan lembaga asing (OLA);
- g. Menyiapkan bahan rumusan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Penanganan Konflik;
- h. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
- i. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi

Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi berdasarkan Pasal 627 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengendalian operasional dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan sosial dan ekonomi. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun dan menganalisa data dari informasi yang berkaitan dengan ketahanan sosial dan ekonomi;
- b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun, menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi sosial kemasyarakatan;
- c. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun dan menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi;

- d. Penyiapan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan monitoring di Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Bidang;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan ketahanan sosial dan ekonomi;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi, kemasyarakatan, profesi, LSM serta lembaga kemasyarakatan lainnya;
- d. Menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi;
- e. Menyiapkan bahan program kerja/ Kegiatan bidang ketahanan sosial dan ekonomi;
- f. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik

Sesuai dengan Pasal 630 Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merencanakan operasional dan melaksanakan pengendalian dan fasilitasi pembinaan politik untuk menciptakan stabilitas kehidupan politik. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun dan menganalisa data dari informasi yang berkaitan dengan pembinaan politik;
- b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun, menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi politik dan penyelenggaraan Pemilu;
- c. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, tentang budaya politik dan pelaksanaan demokratisasi;
- d. Penyiapan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan monitoring di Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik, mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Bidang;

- b. Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga legislatif/ eksekutif;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan partai politik;
- d. Menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu;
- e. Menyiapkan bahan kebijakan dan memfasilitasi mengenai budaya politik, pendidikan politik dan pelaksanaan demokratisasi;
- f. Menyiapkan bahan program kerja/ Kegiatan bidang fasilitasi pembinaan politik;
- g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, sangat dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang cukup handal dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang memiliki kemampuan profesional dalam menunjang tugas.

Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten berjumlah 35 orang, terdiri dari :

- 1. Eselon II : 1 orang
- 2. Eselon III : 4 orang
- 3. Eselon IV : 1 orang
- 4. Pejabat Fungsional : 9 orang
- 5. Pelaksana : 21 Orang

Rincian data pegawai menurut pendidikan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten Menurut Esselonering
(Data Desember 2022)

No.	Esselon	A		B		Jumlah	Ket.
		L	P	L	P		
1	II	1	-	-	-	1	
2	III	4	-	-	-	4	
3	IV	-	1	-	-	1	
4	Jabatan Fungsional	7	2			9	
	Jumlah	12	3	-	-	15	

Keterangan : Data Renstra OPD 2023-2026 per 31 Desember 2022

Adapun rincian data pegawai menurut golongan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten
(Data Desember 2023)

No.	Sekretariat/Bidang	PNS			TKS			Total
		L	P	JML	L	P	JML	
1.	Kepala	1	-	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	10	7	17	22	3	25	42
3.	Bidang Bina Ideologi dan WawasanKebangsaan	3	-	5	3	1	4	7
4.	Bidang Kewaspadaan Nasional	5	-	6	2	2	4	9
5.	Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi	4	2	5	3	1	4	10
6.	Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik	4	-	5	1	3	4	8
	Jumlah	27	9	36	31	10	41	77

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten Menurut Jenis Pendidikan Terakhir
(Data Desember 2023)

No.	Strata Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Ket.
1.	S 2	11	1	12	
2.	S 1	15	7	22	
3.	D 4	-	-	-	
3.	D3	-	-	-	
4.	D1	-	-	-	
5.	SLTA	1	1	2	
6.	SLTP	-	-	-	
7.	SD/SR	-	-	-	
	Jumlah	27	9	36	

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten Menurut Jenis Golongan
(Data Desember 2023)

No.	Golongan	A		B		C		D		JML
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	IV	8	-	2	-	-	-	1	-	11
2.	III	2	1	1	2	1	2	10	4	23
3.	II	-	-	-	-	2	-	-	-	2
4.	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	10	1	3	2	3	2	11	4	36

Keterangan : Data per 31 Desember 2022

2.3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kantor merupakan alat kerja beraktivitas dinas pekerjaan khususnya

dalam melaksanakan pekerjaan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten yang harus diadakan, agar dinas pekerjaan bisa berjalan dengan lancar dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten meliputi: Barang inventaris/peralatan kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan lainnya. Adapun prasarana dan sarana terlampir.

Barang inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan komputer, serta peralatan kantor lainnya. Sedangkan kendaraan dinas meliputi kendaraan roda empat dan roda dua. Barang inventaris tersebut diperoleh melalui pengadaan APBD yang harus dipergunakan dalam aktivitas kedinasan. Selanjutnya rincian dari aset yang dimiliki Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten terlampir berikut dibawah ini :

Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten (Data Januari 2023)

NO.		NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KET.
1		2	3	4	5
I		BANGUNAN	m ²	± 1.050,52	
II		KENDARAAN :			
	1.	Roda 4	Unit	19	Baik
	2.	Roda 2	Unit	10	Baik
III		APK			
		Tahun 2001			
	1.	Filling / Metal	Unit	1	Baik
	2.	Band Kas	Unit	1	Baik
	3.	White Board	Unit	1	Baik
	4.	Kursi Putar	Unit	2	Baik
	5.	Kursi Putar	Unit	4	Baik
	6.	Kursi Putar	Unit	2	Baik
	7.	Kursi Putar	Unit	1	Baik
	8.	Kursi Putar	Unit	4	Baik
	9.	Kursi Putar	Unit	1	Baik
	10.	Kursi Putar	Unit	2	Baik
	11.	Kursi Putar	Unit	2	Baik
	12.	Kursi Putar	Unit	4	Baik
	13.	Meja Biro	Unit	1	Baik
	14.	Meja Biro	Unit	2	Baik
	15.	Jam Mekanis	Unit	1	Baik
	16.	Televisi	Unit	1	Baik
	17.	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Unit	1	Baik
	18.	Printer	Unit	1	Baik
	19.	Meja Kerja Pejabat Ess.II	Unit	1	Baik
	20.	Meja Kerja Pejabat Ess.III	Unit	4	Baik

NO.		NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KET.
	21.	Kursi kerja Pejabat Ess.II	Unit	1	Baik
	22.	Kursi Kerja Pejabat Ess.III	Unit	4	Baik
	Tahun 2002				
	1.	Lemari Besi	Unit	1	Baik
	2.	Lemari Besi	Unit	1	Baik
	3.	Lemari Besi	Unit	1	Kurang Baik
	4.	Lemari Besi	Unit	1	Baik
	5.	Filling Besi / Metal	Unit	1	Baik
	6.	Filling Besi / Metal	Unit	1	Baik
	7.	Filling Besi / Metal	Unit	1	Kurang Baik
	8.	Filling Besi / Metal	Unit	4	Kurang Baik
	9.	Band kas	Unit	1	Baik
	10.	Kursi Putar	Unit	2	Baik
	11.	Kursi Putar	Unit	2	Baik
	12.	Kursi Putar	Unit	10	Baik
	13.	Kursi Putar	Unit	10	Baik
	14.	Kursi Lipat	Unit	1	Baik
	15.	Kursi Lipat	Unit	2	Baik
	16.	Meja Biro	Unit	13	Baik
	Tahun 2004				
	1.	Filling Besi / metal	Unit	11	Baik
	2.	AC Split	Unit	2	Kurang Baik
	3.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Ess.III	Unit	1	Rusak Berat
	4.	Proyektor + Attachment	Unit	1	Baik
	5.	Proyektor + Attachment	Unit	1	Baik
	6.	Camera Elektronik	Unit	1	Baik
	Tahun 2005				
	1.	Mesin Ketik Elektronik	Unit	1	Baik
	2.	Filling Besi / Metal	Unit	1	Baik
	3.	Filling Besi / Metal	Unit	2	Baik
	4.	Zice	Unit	1	Baik
	5.	Meja Rapat	Unit	6	Baik
	6.	Meja Rapat	Unit	2	Baik
	7.	Kursi Lipat	Unit	2	Baik
	8.	Kursi Lipat	Unit	22	Baik
	9.	Kursi Lipat	Unit	11	Baik
	10.	Kursi Lipat	Unit	1	Baik
	11.	Televisi	Unit	1	Baik
	12.	Dispenser	Unit	1	Baik
	13.	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	Unit	1	Baik
	14.	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	Unit	1	Baik
	15.	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	Unit	2	Baik
	16.	Kursi Kerja Pejabat lain-Lain	Unit	2	Baik
	17.	Kursi Kerja Pejabat lain-Lain	Unit	1	Baik
	18.	Lemari Buku Untuk Pejabat Ess.II	Unit	1	Baik
	19.	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	Unit	1	Baik
	20.	Camera + Attachment	Unit	1	Baik
	21.	Stabilizer	Unit	1	Kurang Baik

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KET.
	Tahun 2007			
1.	Mesin Ketik Manual Portable	Unit	4	Baik
2.	White Board	Unit	2	Baik
3.	PC Unit	Unit	1	Baik
4.	Laptop	Unit	1	Baik
5.	Printer	Unit	1	Baik
6.	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	Unit	1	Baik
7.	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	Unit	2	Baik
8.	Stabilizer	Unit	5	Baik
	Tahun 2008			
1.	Mesin Ketik Elektronik	Unit	1	Baik
2.	Handy Cam	Unit	2	Baik
3.	Local Area Network (LAN)	Unit	1	Rusak Berat
4.	PC Unit	Unit	2	Baik
5.	PC Unit	Unit	1	Baik
6.	Laptop	Unit	1	Kurang Baik
7.	Printer	Unit	2	Baik
8.	Server	Unit	1	Baik
9.	Camera + Attachment	Unit	2	Baik
10.	UPS	Unit	1	Baik
11.	Slide Projector	Unit	1	Baik
	Tahun 2009			
1.	Papan Pengumuman	Unit	24	Baik
2.	Papan Pengumuman	Unit	4	Baik
3.	Papan Pengumuman	Unit	9	Baik
4.	White Board	Unit	1	Baik
5.	White Board	Unit	8	Baik
6.	White Board	Unit	2	Baik
7.	White Board	Unit	1	Baik
8.	White Board	Unit	1	Baik
9.	Mesin Potong Rumput	Unit	1	Baik
10.	Handy Cam	Unit	1	Baik
11.	Laptop	Unit	1	Baik
12.	Laptop	Unit	1	Rusak Berat
13.	Printer	Unit	1	Baik
14.	Printer	Unit	1	Baik
15.	Printer	Unit	1	Baik
16.	Camera + Attachment	Unit	2	Baik
17.	Projector + Attachment	Unit	2	Baik
18.	Alat Pemadam Kebakaran	Unit	6	Baik
19.	Alat Pemadam Kebakaran	Unit	5	Baik
	Tahun 2010			
1.	Mesin Ketik Elektronik	Unit	5	Baik
2.	Filling Besi / Metal	Unit	6	Baik
3.	Filling Besi / Metal	Unit	1	Baik
4.	Lemari Kayu	Unit	4	Baik
5.	Papan Pengumuman	Unit	8	Baik
6.	Tempat Tidur Kayu	Unit	1	Baik
7.	Meja Rapat	Unit	2	Baik
8.	Kursi Rapat	Unit	40	Baik
9.	Kursi Tamu	Unit	4	Baik
10.	Kursi Putar	Unit	19	Baik
11.	Kursi Lipat	Unit	19	Baik

NO.		NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KET.
	12.	Kursi Lipat	Unit	1	Rusak Berat
	13.	Meja Biro	Unit	15	Baik
	14.	Lemari Es	Unit	2	Baik
	15.	AC Split	Unit	2	Baik
	16.	AC Split	Unit	4	Baik
	17.	AC Split	Unit	3	Baik
	18.	AC Split	Unit	2	Baik
	19.	AC Split	Unit	1	Baik
	20.	AC Split	Unit	1	Baik
	21.	AC Split	Unit	4	Baik
	22.	Kompore Gas	Unit	2	Baik
	23.	Tabung Gas	Unit	2	Baik
	24.	Televisi	Unit	2	Baik
	25.	Dispenser	Unit	2	Baik
	26.	Handy Cam	Unit	2	Baik
	27.	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	Unit	1	Baik
	28.	Laptop	Unit	2	Baik
	29.	Laptop	Unit	1	Baik
	30.	Laptop	Unit	1	Baik
	31.	Laptop	Unit	1	Baik
	32.	Laptop	Unit	2	Baik
	33.	Laptop	Unit	1	Baik
	34.	Hard Disk	Unit	2	Baik
	35.	Hard Disk	Unit	1	Baik
	36.	Hard Disk	Unit	5	Baik
	37.	Printer	Unit	1	Baik
	38.	Printer	Unit	1	Baik
	39.	Printer	Unit	1	Baik
	40.	Scanner	Unit	1	Baik
	41.	Meja Kerja Pejabat Ess.II	Unit	1	Baik
	42.	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	Unit	6	Baik
	43.	Kursi Kerja Pejabat Ess.II	Unit	1	Baik
	44.	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	Unit	6	Baik
	45.	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	Unit	2	Baik
	46.	Camera + Attachment	Unit	1	Baik
	47.	Camera + Attachment	Unit	2	Baik
	48.	Microphones / Wireless Mic	Unit	1	Baik
	49.	UPS	Unit	3	Baik
	50.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	Baik
	Tahun 2011				
	1.	Rak Kayu	Unit	1	Baik
	2.	Meja Rapat	Unit	20	Baik
	3.	Meja Rapat	Unit	4	Baik
	4.	Meja Rapat	Unit	22	Baik
	5.	AC Split	Unit	2	Baik
	6.	AC Split	Unit	2	Baik
	7.	AC Split	Unit	2	Baik
	8.	Soud System	Unit	1	Baik
	9.	Handy Cam	Unit	3	Baik
	10.	PC Unit	Unit	4	Baik
	11.	Laptop	Unit	2	Baik

NO.		NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KET.
	12.	Laptop	Unit	2	Baik
	13.	Printer	Unit	1	Baik
	14.	Printer	Unit	3	Baik
	15.	Printer	Unit	4	Baik
	16.	Slide Projector	Unit	2	Baik
	17.	Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	1	Baik
	18.	Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	1	Baik
	19.	Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	1	Baik
	20.	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	Unit	1	Baik
	Tahun 2012				
	1.	Filling Besi / Metal	Unit	10	Baik
	2.	Lemari Kaca	Unit	10	Baik
	3.	AC Split	Unit	2	Baik
	4.	Exhaust Fan	Unit	11	Baik
	5.	Exhaust Fan	Unit	1	Baik
	6.	Camera Film	Unit	2	Baik
	7.	Dispenser	Unit	3	Baik
	8.	Dispenser	Unit	1	Baik
	9.	PC Unit	Unit	5	Baik
	10.	Laptop	Unit	2	Baik
	11.	Laptop	Unit	1	Baik
	12.	Laptop	Unit	1	Baik
	13.	Printer	Unit	1	Baik
	14.	Printer	Unit	5	Baik
	15.	Monitor	Unit	1	Baik
	16.	Server	Unit	1	Baik
	17.	HUB	Unit	1	Baik
	18.	Tripod Camera	Unit	2	Baik
	Tahun 2013				
	1.	Rak Besi / Metal	Unit	14	Baik
	Tahun 2014				
	1.	Mesin Fotocopy Dengan Kertas Folio	Unit	1	Baik
	2.	Mesin Fotocopy Dengan Kertas Folio	Unit	1	Baik
	3.	Filling Besi / Metal	Unit	2	Baik
	4.	Filling Besi / Metal	Unit	4	Baik
	5.	Band Kas	Unit	1	Baik
	6.	Rotary Filling	Unit	2	Baik
	7.	Lemari Kaca	Unit	1	Baik
	8.	Lemari Kayu	Unit	1	Baik
	9.	Lemari Kayu	Unit	1	Baik
	10.	Alat Penghancur Kertas	Unit	1	Baik
	11.	Mesin Absensi	Unit	1	Baik
	12.	Meja Rapat	Unit	1	Baik
	13.	Kursi Tamu	Unit	2	Baik
	14.	Meja Biro	Unit	10	Baik
	15.	Sofa	Unit	1	Baik
	16.	Mesin Potong Rumput	Unit	1	Baik
	17.	AC Split	Unit	3	Baik
	18.	AC Split	Unit	6	Baik
	19.	Exhaust Fan	Unit	12	Baik
	20.	Televisi	Unit	1	Baik
	21.	Televisi	Unit	2	Baik
	22.	Dispenser	Unit	6	Baik

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KET.
23.	Dispenser	Unit	1	Baik
24.	Handy Cam	Unit	1	Baik
25.	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	Unit	50	Baik
26.	Personal Computer Lain-Lain	Unit	3	Baik
27.	PC Unit	Unit	5	Baik
28.	Laptop	Unit	7	Baik
29.	Laptop	Unit	2	Baik
30.	Printer	Unit	5	Baik
31.	Printer	Unit	4	Baik
32.	Meja Kerja Pejabat Ess.IV	Unit	5	Baik
33.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	1	Baik
34.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	1	Baik
35.	Kursi Kerja Pejabat Ess.II	Unit	1	Baik
36.	Kursi Kerja Pejabat Ess.II	Unit	1	Baik
37.	Kursi Kerja Pejabat Ess.IV	Unit	5	Baik
38.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	1	Baik
39.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	1	Baik
40.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Ess.II	Unit	1	Baik
41.	Camera + Attachment	Unit	2	Baik
42.	Camera + Attachment	Unit	1	Baik
43.	Slide Projctor	Unit	2	Baik
44.	Slide Projctor	Unit	1	Baik
45.	Handy Talky	Unit	4	Baik
Tahun 2015				
1.	Mesin Fotocopy Dengan Kertas Folio	Unit	2	Baik
2.	Rak Besi / Metal	Unit	5	Baik
3.	Papan Visuil	Unit	1	Baik
4.	Papan Visuil	Unit	1	Baik
5.	Alat Penghancur Kertas	Unit	6	Baik
6.	Papan Pengumuman	Unit	5	Baik
7.	Kursi Rapat	Unit	12	Baik
8.	Bangku Tunggu	Unit	2	Baik
9.	Meja Biro	Unit	5	Baik
10.	AC Unit	Unit	4	Baik
11.	AC Unit	Unit	1	Baik
12.	AC Unit	Unit	4	Baik
13.	Kipas Angin	Unit	2	Baik
14.	Televisi	Unit	9	Baik
15.	Sound System	Unit	1	Baik
16.	Camera Video	Unit	6	Baik
17.	Camera Video	Unit	2	Baik
18.	Coffee Maker	Unit	1	Baik
19.	Coffee Maker	Unit	1	Baik
20.	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	Unit	1	Baik
21.	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	Unit	1	Baik
22.	Alat Rumah Tangga	Unit	2	Baik

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KET.
	Lain-Lain			
23.	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	Unit	1	Baik
24.	PC Unit	Unit	6	Baik
25.	Laptop	Unit	6	Baik
26.	Laptop	Unit	1	Baik
27.	Printer	Unit	4	Baik
28.	Printer	Unit	4	Baik
29.	Printer	Unit	10	Baik
30.	Printer	Unit	10	Baik
31.	Meja Kerja Pejabat Ess.II	Unit	1	Baik
32.	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	Unit	1	Baik
33.	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	Unit	11	Baik
34.	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	Unit	5	Baik
35.	Telephone Mobile	Unit	5	Baik
36.	Screen	Unit	1	Baik
37.	Bangunan Gedung Semi Permanen	Unit	1	Baik
38.	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	Unit	1	Baik
39.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	Baik
40.	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	1	Baik
41.	Jaringan Telepon di Atas Tanah Kapasitas Sedang	Unit	1	Baik
Tahun 2016				
1.	Mesin Ketik Manual Portable	Unit	1	Baik
2.	Mesin Ketik Elektronik	Unit	2	Baik
3.	Mesin Penghitung Uang	Unit	1	Baik
4.	Rak Besi / Metal	Unit	5	Baik
5.	Filling Besi / Metal	Unit	6	Baik
6.	Alat Penghancur Kertas	Unit	3	Baik
7.	Alat Penghancur Kertas	Unit	1	Baik
8.	Kursi Biasa	Unit	6	Baik
9.	Televisi	Unit	4	Baik
10.	Printer	Unit	4	Baik
11.	Printer	Unit	2	Baik
12.	Camera + Attachment	Unit	2	Baik
13.	Personal Computer	Unit	3	Baik
14.	Meja Kerja	Unit	6	Baik
15.	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Unit	1	Baik

2.4. Anggaran

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten pada tahun anggaran 2023 memiliki 6 (Enam) program, 12 (Dua belas) kegiatan, 64 (Enam Puluh Empat) Sub Kegiatan. Adapun rencana kinerja kegiatan dari program, kegiatan dan Sub kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 2.4.
RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN
1	2
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24,817,754,877
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	483,899,900
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	141,967,900
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7,810,000
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	7,810,000
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,800,000
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,800,000
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	205,054,000
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117,658,000
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,350,585,000
8) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,694,000,000
9) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	556,585,000
10) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10,706,000
11) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	29,199,000
12) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33,353,000
13) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8,750,000
14) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10,000,000
15) Penyusunan Pelaporandan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7,992,000
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1,546,667,967
16) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,143,767,967
17) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	500,000
18) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	402,400,000
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	549,567,000
19) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	215,100,000
20) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6,120,000
21) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	21,955,000
22) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	51,600,000
23) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11,586,000
24) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	21,036,000
25) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	222,170,000
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	833,349,400
26) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	173,016,900
27) Penyediaan Bahan/Material	318,143,900
28) Fasilitas Kunjungan Tamu	2,048,600
29) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300,000,000
30) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	17,750,000
31) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	22,390,000

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,236,689,520
32) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19,700,000
33) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	609,915,000
34) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,000
35) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,607,071,520
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,330,996,100
36) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,056,138,100
37) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	83,160,000
38) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	191,698,000
II. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	5,650,134,835
8. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	5,650,134,835
39) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	260,000,000
40) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4,815,044,235
41) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	190,000,000
42) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	188,490,600
43) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	196,600,000
III. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	288,333,270,000
9. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	288,333,270,000
44) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	251,200,000
45) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	600,000,000
46) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	285,412,070,000

47) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1,770,000,000
48) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300,000,000
IV. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.239.607.428
10. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.239.607.428
49) Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	146.176.000
50) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	293.000.000
51) Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	189.659.428
52) Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	141.292.000
53) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	469.480.000
V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2.852.052.300
11. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2.852.052.300
54) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	46.154.300
55) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	453.774.400
56) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.756.000.000
57) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	35.708.400
58) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	560.415.200
VI. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	36,390,257,320

12. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	36,390,257,320
59) Penyusunan ProgramKerja di Bidang Kewaspadaan Dini, KerjaSama Intelijen,Pemantauan OrangAsing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	163,928,000
60) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik diDaerah	389,575,492
61) Pelaksanaan Kebijakan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	32,700,000,000
62) Pelaksanaan Koordinasidi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik diDaerah	810,000,000
63) Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan OrangAsing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik diDaerah	311,055,828
64) Pelaksanaan ForumKoordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	2,015,698,000
JUMLAH	353.797.076.770

TABEL 2.4.
RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT KEGIATAN

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARG ET KINE RJA
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		70-80 nilai
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 persen
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokum en
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokum en
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokum en
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dokum en
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokum en
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan
		Evaluasi Kinerja Perangkat	4

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		Daerah	laporan
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 persen
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 persen
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 persen
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 dokumen
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25 Orang
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	25 Orang
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 persen
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 paket
		Penyediaan Bahan/Material	1 paket
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	12

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4
			laporan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39 unit
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1 unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TOLOK UKUR	
1	2	3	4
2.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		100 persen
2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100 persen
		Penyusunan ProgramKerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, BhinekaTunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 dokumen
		Perumusan KebijakanTeknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	9 dokumen
		Pelaksanaan Koordinasidi Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150 Orang
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan diBidang IdeologiWawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 laporan
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui	2 dokum

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	en
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TOLOK UKUR	
1	2	3	4
3.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYAPOLITIK		66,98 nilai
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		100 persen
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, EtikaBudaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 dokum en
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan diBidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 dokum en
		Pelaksanaan Kebijakan diBidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Orang/ Lemba ga
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	4 laporan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
NO.	PROGRAM / KEGIATAN		
1	2	3	
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		100 persen
4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		100 persen
		Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 dokumen
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang PendaftaranOrmas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 dokumen
		Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas danOrmas Asing di Daerah	100 Orang
		Pelaksanaan Koordinasi Dibidang PendaftaranOrmas, PemberdayaanOrmas, Evaluasi danMediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas danOrmas Asing di Daerah	100 Orang
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang PendaftaranOrmas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas danOrmas Asing di Daerah	6 laporan
NO.	PROGRAM / KEGIATAN		
1	2	3	4
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		88,02 Nilai
5.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		100 persen
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 dokumen
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,	1 dokumen

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Orang/ Lembaga
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 Orang
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan
NO.	PROGRAM / KEGIATAN		
1	2	3	4
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		100 persen
6.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		100 persen
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 dokumen
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 dokumen
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8 Orang/ Lembaga
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	150 Orang

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		Penanganan Konflik di Daerah	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Laporan
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 dokumen

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI ATAS KINERJA TAHUN 2023

3.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

1) Visi dan Misi

Visi : “Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah”.

Misi :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
2. Membangun dan Meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

2) Fungsi dan Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

Adalah salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Setelah berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten masuk ke dalam klasifikasi Urusan Pemerintahan Umum sehingga berimplikasi

pada bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam masa transisi/peralihan tidak merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 83 tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, namun tetap merujuk pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 tahun 2013, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mempunyai tugas pokok : "Membantu Gubernur dalam melaksanakan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik meliputi bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan ekonomi serta fasilitasi pembinaan politik". dan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
3. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kewaspadaan Nasional;
4. Perumusan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
5. Perumusan kebijakan teknis dibidang Fasilitasi Pembinaan Politik;
6. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Provinsi;
7. Pelaksanaan laporan sesuai tugas dan fungsinya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Untuk mencapai Visi serta untuk melaksanakan Misi tersebut di atas, dan juga untuk memecahkan permasalahan serta untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2023-2026, yaitu **Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah Banten Mandiri, Maju, Sejahtera, Berlandaskan Iman dan Taqwa dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat.**

a. Sasaran Jangka Menengah

Sebagai derivasi dari tujuan tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten selanjutnya menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2023-2026, yaitu :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien;
2. Wawasan kebangsaan, keamanan dan stabilitas daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI.

Pada Tabel 4.2. Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran jangka menengah dalam penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tahun 2023-2026, yang dilengkapi dengan indikator sasaran untuk pencapaian target pelayanan selama 4 (Empat) tahun.

Tabel 4.2.
Keterkaitan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten
Tahun 2023-2026

VISI	“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”				
MISI 4	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa				
NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi serta Pencapaian Kinerja Pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pengukuran Pelaporan dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan	Peningkatan kualitas hubungan lintas fungsi yang mendukung capaian kinerja
2	Terwujudnya kebebasan Demokrasi dengan Kondisi Daerah yang Kondusif	Meningkatnya Harmoni Sosial dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum dan HAM yang ditangani	Meningkatkan Keamanan dan Stabilitas Daerah	Peningkatan kualitas pembinaan ideology, politik, ekonomi, social budaya, hukum dan HAM
		Meningkatnya Penegakan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Banten (IDI)	Meningkatkan Kualitas Demokrasi untuk Keamanan dan Stabilitas Daerah	Peningkatan Kualitas Pemahaman masyarakat terhadap penegakan demokrasi

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2023-2026
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IMPACT)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD (Satuan: Nilai)	80.30	80.50	80.50	80.50	80.50
2	Terwujudnya kebebasan Demokrasi dengan Kondisi Daerah yang Kondusif	Meningkatnya Penegakkan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Banten (IDI) (Satuan: Nilai)	76,32	77,55	78,38	79,85	80,05
		Meningkatnya Harmoni Sosial dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum dan HAM yang ditangani (Satuan: Persen)	100	100	100	100	100

3.3. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Rincian Target Indikator Kinerja dalam mencapai sasaran pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Tabel 3.3. Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah)	60 (Satuan: Nilai)	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00	85,00	80,00
B.	Indeks DemokrasiIndonesia Provinsi Banten (Satuan: Poin)	68,46 (satuan: Poin)	70	76	78	78	78	71,91	76,87,00
D.	Penanganan Konflik Masyarakat	100 (Satuan: Persentas e)	100	100	100	100	100	100	100

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja Utama dalam OPD diperlukan Indikator Kinerja Program (outcome) merupakan variabel yang mempengaruhi pencapaian kinerja OPD. Adapun Indikator Kinerja Program (outcome) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3. Indikator Kinerja Program (Outcome) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A.	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	60 (Satuan: Nilai)	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00	85,00
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,05 - 3,52	3,05 - 3,52	3,05 - 3,52	3,05 - 3,52	3,05 - 3,53	3,05 - 3,54
2	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100 (Satuan: %)	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100 (Satuan: %)	100	100	100	100	100	100
4	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 (Satuan: %)	100	100	100	100	100	100
5	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 (Satuan: %)	100	100	100	100	100	100
B.	Indeks DemokrasiIndonesia Provinsi Banten	68,46 (satuan: Poin)	76.87	77.91	78.96	80.00	81.05	81,00
1	Angka Partisipasi Pilpres	(Satuan : %)	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70,00
2	Angka Partisipasi Pileg	(Satuan: %)	73.00	73,00	73.00	73.00	73.00	73,00
3	Angka Partisipasi Pilgub	(Satuan: %)	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
4	Angka Partisipasi Pilkada Kab/Kota	(Satuan: %)	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
5	Persentase Ormas yang mendapatkan pembinaan	70(Satuan: %)	70	70	75	75	75	75
6	Cakupan pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika)	5(Satuan: Dokumen)	22	24	27	29	33	135
C.	Angka Kriminalitas	5002 (satuan: Peristiwa)	3800	3500	3200	3000	2500	4800
1	Persentase penurunan jumlah peristiwa gangguan keamanan	100 (Satuan: %)	100	100	100	100	100	100
D.	Penanganan Konflik Masyarakat	100 (Satuan: %)	100	100	100	100	100	100
1	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dalam Mendukung Stabilitas Daerah	100 (Satuan: %)	100	100	100	100	100	100

3.4. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2023

Secara umum tujuan pelaksanaan Monev adalah mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana, mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi, dan melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan kegiatan.

Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Selanjutnya Rencana Aksi adalah Dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.

Rencana Aksi sangat penting dibuat di awal karena dari situlah kita dapat menganalisa berbagai goal atau tujuan utama yang menjawab problem statement, objektif, aktivitas, hingga eksekusi kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan terkait perubahan yang akan kita lakukan.

Langkah-langkah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi/monev yaitu :

1. Penetapan Tujuan dan Sasaran Monev yang Jelas
2. Identifikasi Indikator Kinerja yang Relevan dan Terukur
3. Penentuan Sumber Daya dan Anggaran
4. Pemantauan dan Pengumpulan Data yang Sistematis
5. Analisis Data dan Evaluasi
6. Pelaporan Hasil Monev.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh penernakat daerah. Hasil monev merupakan informasi berharga yang dapat dijadikan pedoman bagi pimpinan atau pemangku kebijakan untuk mengambil kebijakan bagi organisasi nirlaba dan atau instansi pemerintah.

Selanjutnya Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

RENCANA AKSI TAHUN 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Sub Kegiatan	TAHUN 2023							Penanggung Jawab
		Target Capaian Kinerja	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Rencana Aksi	Pagu Anggaran	
			Target	Target	Target	Target			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pemerintahan Umum									
Kesatuan Bangsa dan Politik	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah) OPD	85				70-80			
	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten	78				77,91			
	Penanganan Konflik Masyarakat	100%				100%			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100%				100%		106.425.621.000	
	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100%				100%			
	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%				100%			
	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%				100%			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38 Dok	10 Dok	9 Dok	8 Dok	11 Dok		12.575.318.330	Subag Keuangan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3 bln	3 bln	3 bln	3 bln	Menyediakan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	11.918.733.330	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	3 bln	3 bln	3 bln	3 bln	Menyediakan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	556.585.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dok	2 dok	0	1 dok	0	Melaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.706.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9 Dokumen	3 dok	2 dok	2 dok	2 dok	Melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	29.199.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Dok	1 dok	1 dok	2 dok	2 dok	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33.353.000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3 Dok	1 dok	1 dok	0	1 dok	Menyusun Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8.750.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	Menyusun Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 dok	0	2 dok	0	3 dok	Menyusun laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.992.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang tepat waktu	30 Dok	7 Dok	6 Dok	9 Dok	8 Dok		654.665.900	Subbag Program, Evaluasi dan Pelaporan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dok	3 Dok	2 Dok	2 Dok	1 Dok	Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	186.753.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	0	0	0	1 Dok	Menyusun Dokumen RKA-SKPD 2022	9.910.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	0	0	1 Dok	0	Menyusun Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2021	9.910.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dok	0	0	0	1 Dok	Menyusun DPA-SKPD 2022	3.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	0	0	1 Dok	0	Menyusun Perubahan DPA-SKPD 2021	3.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	3 Dok	Menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	227.800.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dok	2 Dok	2 Dok	3 Dok	2 Dok	Menyusun Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	214.292.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28 Dok	9 Dok	8 Dok	7 Dok	4 Dok		349.567.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 dok	0	1 dok	0	0	Terselenggaranya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	165.100.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.120.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dok	1 dok	2 dok	1 dok	0	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	21.955.000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11 Dok	3 dok	3 Dok	3 Dok	2 Dok	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	51.600.000	

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 dok	1 dok	0	0	1 dok	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	11.586.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	3 Dok	1 dok	1 dok	1 dok	0	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	21.036.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Dok	2 Dok	0	1 dok	0	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	72.170.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	50 dok	14 dok	12 dok	12 dok	12 dok		1.232.486.800	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 dok	1 dok	0	0	0	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	173.016.900	
	Penyediaan Bahan/Material	12 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	Tersedianya Penyediaan Bahan/Material	318.143.900	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	Terfasilitasi Kunjungan Tamu	25.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	675.686.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dok	2 dok	0	0	0	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	17.750.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11 dok	2 dok	3 dok	3 dok	3 dok	Terlaksananya dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	22.390.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 Dok	4 Do	1 dok	0 Dok	0 Dok		2.828.085.967	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 dok	3 dok	1 dok	1 dok	0	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.636.223.867	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dok	1 dok	0	0	0	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	500.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dok	0	0	1 dok	0	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	191.362.100	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37 bln	9 bln	10 bln	9 bln	9 bln		2.954.794.220	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bln	3 Bln	3 Bln	3 Bln	3 Bln	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.300.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bln	3 Bln	3 Bln	3 Bln	3 Bln	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	595.365.000	

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 bln	0	1 bln	0	0	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	300.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bln	3 Bln	3 Bln	3 Bln	3 Bln	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.338.829.220	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Dok	3 Dok	3 Dok	3 dok	3 dok		1.340.629.600	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	39 unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	9 Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	1.022.728.100	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	Terpeliharanya Aset Tetap Lainnya	126.203.500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 gedung	0	1 gedung	0	0	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	191.698.000	
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI)	33%				33%		6.212.583.055	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	19 Dok	7 Dokumen	12 Dokumen	7 Dokumen	3 Dokumen		6.212.583.055	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	8 dok	0	3 Dok	3 Dok	2 Dok	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	320.000.000	Subid Pembauran dan Kewarganegaraan
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	10 Keg	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	5.142.583.055	Subid Wawasan Kebangsaan
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Lembaga	0	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200.000.000	Subid Wawasan Kebangsaan
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5 dok	2 dok	3 dok	0	0	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300.000.000	

	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	6 dok	2 dok	3 dok	1 dok	0	Terbentuknya dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	250.000.000	
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Angka pemilu/pemilukada	80%				80%		38.172.070.000	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		36 dok	8 dok	11 dok	11 dok	6 dok		38.172.070.000	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9 dok	2 dok	3 dok	3 dok	1 dok	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300.000.000	Subid Fasilitasi Organisasi Politik
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6 Dok	2 Dok	1 dok	2 Dok	1 dok	Tersusunnya Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	600.000.000	Subid Fasilitasi Organisasi Politik

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Dok	0	1 Dok	0	0	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	35.412.070.000	Subid Pembinaan Budaya Politik
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 dok	2 dok	3 dok	3 dok	2 dok	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.260.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 dok	2 dok	3 dok	3 dok	2 dok	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	600.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang mendapatkan Pembinaan	75%				75%		1.560.000.000	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		8 dok	2 dok	2 dok	3 dok	1 dok		1.560.000.000	
	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Dok	1 Dok	0	0	0	Tersusunnya Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150.000.000	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Dok	1 Dok	0	0	0	Tersusunnya Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300.000.000	

	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Dok	0	1 Dok	0	0	Terlaksananya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Dok	0	1 Dok	0	0	Terlaksananya Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Dok	0	0	3 Dok	1 Dok	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	710.000.000	
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		75%				75%		2.923.996.300	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		29 dok	6 dok	12 dok	8 dok	6 dok		2.923.996.300	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Dok	1 dok	3 dok	1 dok	1 dok	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	168.715.500	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	10 dok	1 dok	3 dok	3 dok	3 dok	Tersusunnya Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	624.626.800	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 dok	1 dok	1 dok	0	0	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.506.000.000	

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6 Dok	2 dok	2 dok	1 dok	1 dok	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	76.336.800	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8 dok	1 dok	3 dok	3 dok	1 dok	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	548.317.200	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dalam Mendukung Stabilitas Daerah	100%				100%		35.621.423.828	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	41 dok	12 dok	15 dok	10 dok	4 dok		35.621.423.828	Subid Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 dok	1 dok	3 dok	0	0	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200.000.000	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	7 Keg	2 Keg	3 Keg	2 Keg	0	Tersusunnya Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	400.000.000	

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan	2 dok	1 dok	1 dok	0	0	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	30.500.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10 dok	3 dok	3 dok	3 dok	1 dok	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.505.330.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6 dok	2 dok	2 dok	2 dok	0	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	445.114.828	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	12 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	2.570.979.000	
JUMLAH								106.425.621.000	

Serang, 30 Januari 2023

a.n. KEPALA BADAN KESBANGPOL
PROVINSI BANTEN
Sekretaris,

Epi Rustam, S.Kom, MM
NIP. 19690111 199603 1 003

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten diharapkan menjadi Pedoman untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait, dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

Demikian Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2023 ini, disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi di tahun selanjutnya, dan besar harapan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mampu memberikan kontribusi mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Banten.

Serang, Januari 2024

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN



H. DEDEN APRIANDHI H, S.STP, M.Si

NIP. 19750428 199412 1 001